



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MARAKNYA PHK DI INDUSTRI *STARTUP*

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini industri nasional sedang mengami masalah terutama pada industri manufaktur yang padat karya, salah satunya industri alas kaki. Pada tahun 2022, industri alas kaki telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 25.700 pekerja. PHK tersebut disebabkan karena ekonomi global yang melemah. Gelombang PHK secara besar-besaran juga diprediksi akan terjadi di awal tahun 2023 ini.

PHK marak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya. Tidak hanya pada perusahaan yang sudah lama berdiri, tapi juga terhadap perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*). Sejak Januari hingga Desember 2022 terdapat 930 perusahaan rintisan di dunia yang melakukan PHK. Total jumlah pekerja yang di PHK mencapai 146.407 pekerja. Tingginya jumlah pekerja yang ter-PHK menimbulkan kecemasan akan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa di tahun 2022 rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5.85%. Jika dilihat berdasarkan tren provinsi di Indonesia, maka Jawa Barat menjadi provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 8,33%. Posisinya diikuti oleh Banten dengan TPT sebesar 8,31% dan Kepulauan Riau sebesar 8.13%.

Pada awal tahun 2023, gelombang PHK di perusahaan-perusahaan rintisan belum berakhir. Informasi terbaru menyebutkan bahwa intensitas PHK yang dilakukan perusahaan rintisan kian bertambah. Go To telah mem-PHK sebanyak 1.300 pekerja dan baru-baru ini kembali melakukan PHK kepada 600 pekerjanya. Kemudian, Shopee, JD.ID, dan Zenius masing-masing mem-PHK sebanyak 200 pekerja, dan Moladin mem-PHK 360 pekerja. Hal yang sama juga dilakukan perusahaan rintisan lainnya, seperti: Sirdo dan Lummo.

Alasan perusahaan-perusahaan rintisan tersebut melakukan PHK adalah *pertama*, terkait dengan prediksi global tahun ini dan tahun depan yang berimplikasi pada penurunan pendapatan perusahaan rintisan, sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi. *Kedua*, *miss management* (salah urus) dalam pengelolaan perusahaan. Ketiga, persaingan yang tidak sehat berupa *predatory pricing* (perang harga). Keempat, kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan sehingga investor menyetop pendanaan karena turunnya nilai uang.

Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai kegiatan sebagai langkah antisipasi berupa mengembangkan program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK dan kegiatan pembuatan produk-produk UMKM. Langkah lain adalah mengadakan pendidikan keterampilan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan dan membuka program perhutanan sosial supaya masyarakat memiliki akses pada lahan. Pemerintah juga berupaya mendatangkan investasi di berbagai tempat dan memberikan bantuan sosial. Hal yang juga penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk regulasi terkait *predatory pricing* khususnya pada perusahaan rintisan.

Atensi DPR

Pada awal tahun 2023, gelombang PHK di perusahaan-perusahaan rintisan kian bertambah. Selain itu, kinerja perusahaanpun mengalami penurunan sebagai akibat dari perlambatan kondisi ekonomi global, *miss management* dan *predatory pricing*. Penurunan kinerja dan peningkatan gelombang PHK pekerja pada perusahaan rintisan (*startup*) perlu mendapat perhatian Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor ketenagakerjaan. Dari sisi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah dalam melakukan langkah-langkah kebijakan penanganan pekerja yang terkena PHK melalui program-program yang mendukung pemberdayaan pekerja ter-PHK khususnya pada perusahaan-perusahaan rintisan. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur *predatory pricing* sebagai upaya menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat pada perusahaan-perusahaan rintisan.

Sumber

CNBC Indonesia, 15 Maret 2023;

Kontan, 11 Maret 2023;

merdeka.com, 11 Maret 2023;

Sindo, 14 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023